



## BAB 2

# Pertumbuhan Ekonomi

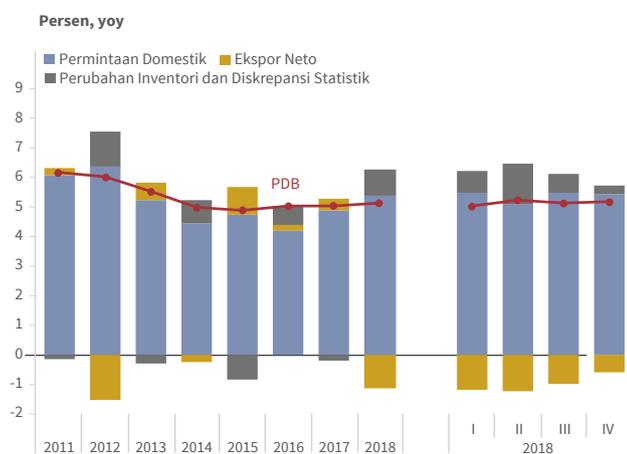
Momentum pemulihan ekonomi Indonesia pada 2018 tetap berlanjut di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat dan ketidakpastian yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi meningkat ditopang oleh permintaan domestik yang tumbuh tinggi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berdampak positif pada penurunan tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan.

## Bab 2 Pertumbuhan Ekonomi

Momentum pemulihan ekonomi Indonesia berlanjut pada 2018. Pertumbuhan ekonomi 2018 tercatat 5,17%, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 5,07% (Grafik 2.1) dan merupakan pertumbuhan tertinggi sejak 2013. Secara umum, kinerja tersebut menunjukkan perekonomian Indonesia tetap solid, mengingat pada saat bersamaan pertumbuhan ekonomi dunia 2018 dalam tren melambat dan ketidakpastian global sedang meningkat.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi 2018 tidak terlepas dari dampak positif bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah dalam merespons ketidakpastian global. Satu sisi, respons kebijakan moneter yang *pre-emptive*, *front loading*, dan *ahead of the curve* untuk menjaga stabilitas perekonomian, khususnya nilai tukar, serta komitmen pemerintah untuk menjaga prospek kesinambungan fiskal, memberikan keyakinan pelaku ekonomi untuk melakukan ekspansi usaha. Sisi lain, arah kebijakan yang akomodatif dari kebijakan fiskal pusat-daerah, termasuk belanja proyek infrastruktur, kebijakan pendalaman pasar keuangan, kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, dan kebijakan struktural memberikan stimulus bagi kegiatan ekonomi. Implementasi kebijakan tersebut pada gilirannya mendorong berlanjutnya kegiatan berusaha dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Grafik 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



Sumber: BPS, diolah

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat pada 2018 banyak ditopang oleh permintaan domestik. Pertumbuhan konsumsi dan investasi meningkat didukung pendapatan yang membaik, keberlanjutan pembangunan proyek infrastruktur, serta daya beli yang terjaga sejalan dengan tekanan inflasi yang rendah. Beberapa kegiatan lain juga memengaruhi pengeluaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada), kegiatan berskala internasional, seperti di Asian Games dan pertemuan tahunan International Monetary Fund-World Bank (IMF-WB) dan aktivitas persiapan pemilihan umum (Pemilu). Sementara itu, peran ekspor neto menurun dipengaruhi kinerja ekspor yang melambat seiring pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat, di tengah impor yang tumbuh tinggi sejalan dengan kenaikan permintaan domestik.

Ekspansi perekonomian dari sisi lapangan usaha dipengaruhi oleh sektor sekunder dan sektor tersier. Sejalan dengan konsumsi dan aktivitas impor barang yang tumbuh kuat, kinerja lapangan usaha (LU) perdagangan besar dan eceran tumbuh tinggi. Peningkatan belanja pemerintah termasuk belanja yang terkait anggaran pendidikan mendorong pertumbuhan LU jasa administrasi pemerintahan dan LU jasa pendidikan. Kinerja LU konstruksi juga tumbuh kuat sejalan dengan percepatan penyelesaian pembangunan proyek infrastruktur yang telah memasuki tahap akhir. Sementara itu, kinerja LU industri pengolahan sebagai sektor dengan pangsa terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB), tumbuh stabil pada 2018.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi menguat di hampir seluruh wilayah. Perekonomian Jawa dan Sumatera tumbuh membaik, bahkan Maluku-Papua (Mapua) tumbuh lebih tinggi. Permintaan domestik yang kuat menjadi mesin utama pertumbuhan Jawa dan Sumatera. Pertumbuhan ekonomi Jawa yang kuat juga ditopang oleh membaiknya ekspor seiring dengan meningkatnya kinerja LU industri pengolahan. Perekonomian Mapua yang tumbuh tinggi dipengaruhi peningkatan kinerja ekspor tambang yang signifikan. Berbeda dengan kinerja ekspor di Mapua, perkembangan ekspor tambang di Kalimantan dan Bali-Nusa Tenggara (Bali-Nusra) menurun, sehingga berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi yang melambat di kedua

wilayah ini. Sementara itu, perlambatan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi lebih dipengaruhi oleh melambatnya investasi.

Keberlanjutan pemulihan ekonomi berpengaruh positif pada perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi. Berbagai indikator kesejahteraan masyarakat seperti tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan kembali menurun pada 2018. Perkembangan positif pasar ketenagakerjaan tercermin pada penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang disertai dengan perbaikan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Tingkat kemiskinan pada 2018 melanjutkan tren penurunan dan bahkan berada pada level terendah semenjak krisis ekonomi 1998. Indikator ketimpangan juga menunjukkan penurunan yang dipengaruhi oleh berbagai upaya pemerintah untuk menjaga daya beli dan pengeluaran pada masyarakat kelompok bawah di tengah daya beli dan pengeluaran kelompok 20% teratas yang menurun.

## 2.1. Permintaan Domestik Meningkat

Permintaan domestik yang kuat banyak berperan dalam memengaruhi ekspansi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2018. Permintaan domestik pada 2018 bertumbuh sebesar 5,62%, tertinggi sejak 2012,

didorong pengeluaran konsumsi baik rumah tangga (RT), lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) maupun Pemerintah. Selain itu, pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang tinggi, ditopang investasi nonbangunan dan investasi bangunan, juga berkontribusi pada kenaikan permintaan domestik. Permintaan domestik yang kuat pada gilirannya dapat memitigasi kontribusi sektor eksternal yang pada 2018 secara neto tercatat negatif akibat kinerja ekspor yang melambat dan impor yang tinggi (Tabel 2.1).

Konsumsi rumah tangga kembali tumbuh di atas 5% dipengaruhi membaiknya pendapatan. Pendapatan rumah tangga yang tetap tinggi didorong inflasi yang rendah serta dampak positif stimulus fiskal dan berbagai kegiatan besar tahun 2018. Peningkatan stimulus fiskal melalui perluasan penyaluran bantuan sosial (bansos) dan penyesuaian subsidi energi ikut mendukung daya beli kelompok bawah.<sup>1</sup> Sementara itu, beberapa kegiatan besar 2018 yang berkontribusi pada konsumsi rumah tangga ialah Pilkada, Asian Games, pertemuan tahunan IMF-WB, dan persiapan pemilihan umum (Pemilu). Pendapatan yang tetap terkendali juga tergambar pada nilai tukar petani (NTP), upah riil buruh tani, dan upah pekerja di sektor jasa informal yang tumbuh lebih baik dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya (Grafik 2.2).

**Tabel 2.1. PDB Sisi Pengeluaran**

Komponen PDB	2014	2015	2016	2017	2018				
					I	II	III	IV	TOTAL
Permintaan Domestik <sup>1)</sup>	4,62	4,94	4,39	5,13	5,86	5,44	5,81	5,41	5,62
Konsumsi Swasta	5,28	4,84	5,04	4,98	5,01	5,23	5,07	5,20	5,13
Konsumsi Rumah Tangga (RT)	5,15	4,96	5,01	4,94	4,94	5,16	5,00	5,08	5,05
Konsumsi LNPRT	12,19	-0,62	6,64	6,93	8,10	8,75	8,59	10,79	9,08
Konsumsi Pemerintah	1,16	5,31	-0,14	2,13	2,71	5,20	6,27	4,56	4,80
Investasi <sup>2)</sup>	5,66	3,00	4,99	5,69	8,38	8,35	6,53	10,93	8,52
PMTB	4,45	5,01	4,47	6,15	7,94	5,85	6,96	6,01	6,67
Bangunan	5,52	6,11	5,18	6,24	6,16	5,02	5,66	5,02	5,45
Nonbangunan	1,58	1,93	2,43	5,90	13,56	8,33	10,73	8,96	10,31
Perubahan Inventori*	0,48	-0,59	0,23	-0,07	0,35	0,98	-0,02	1,53	0,71
Ekspor Neto*	-0,24	0,94	0,13	0,31	-1,16	-1,22	-0,98	-0,58	-0,98
Ekspor	1,07	-2,12	-1,66	8,91	5,94	7,65	8,08	4,33	6,48
Impor	2,12	-6,25	-2,41	8,06	12,64	15,17	14,02	7,10	12,04
Produk Domestik Bruto	5,01	4,88	5,03	5,07	5,06	5,27	5,17	5,18	5,17

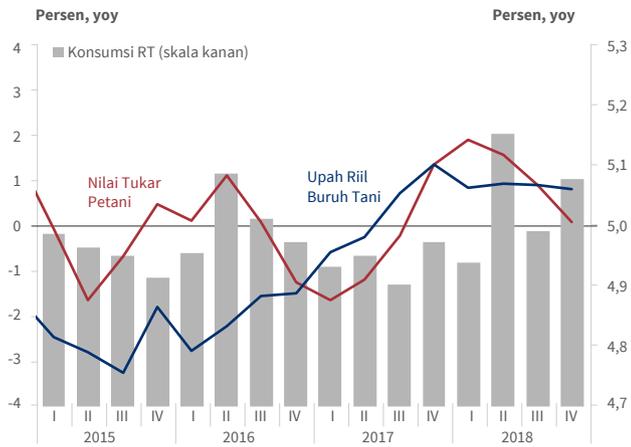
<sup>1)</sup>Permintaan Domestik adalah Pengeluaran Konsumsi (Swasta + Pemerintah) dan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto

<sup>2)</sup>Investasi adalah Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto ditambah Perubahan Inventori

\*kontribusi terhadap PDB  
Sumber: BPS, diolah

1 Selengkapnya terkait bansos lihat Boks 9.1 Perlindungan Sosial dan Transfer ke Daerah untuk Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi.

**Grafik 2.2. Upah Buruh dan Nilai Tukar Petani**



Sumber: BPS, diolah

Perkembangan konsumsi rumah tangga yang solid turut didukung keyakinan konsumen yang meningkat. Indeks keyakinan konsumen pada semua kelas pengeluaran konsumen melanjutkan tren peningkatan sampai dengan paruh pertama 2018 (Grafik 2.3). Peningkatan optimisme konsumen bersumber dari keyakinan yang lebih tinggi akan kondisi ekonomi saat ini maupun ekspektasi terhadap kondisi ekonomi 6 bulan yang akan datang. Keyakinan akan kondisi ekonomi saat ini ditopang oleh perbaikan komponen penghasilan saat ini dan ketepatan waktu pembelian barang tahan lama, serta ketersediaan lapangan kerja yang stabil. Keyakinan konsumen sedikit tertahan pada paruh kedua 2018, sejalan dengan tekanan nilai tukar.

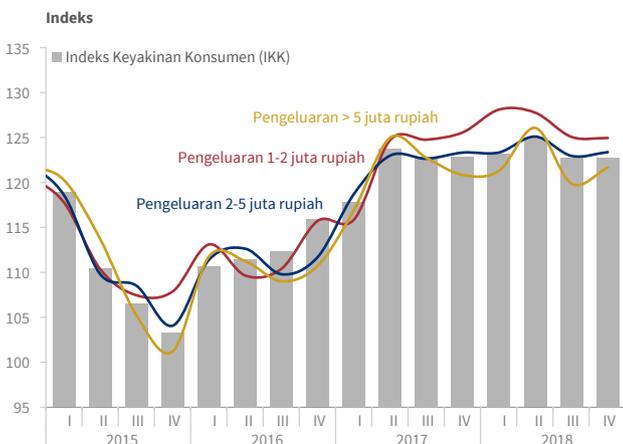
Secara keseluruhan, membaiknya pendapatan dan terjaganya keyakinan konsumen mendukung

peningkatan konsumsi bukan makanan, kecuali kesehatan dan pendidikan. Perbaikan pendapatan juga mendukung berlanjutnya tren pergeseran preferensi konsumen ke arah *leisure* dan *lifestyle*. Hal ini tercermin dari belanja terkait transportasi dan komunikasi, serta restoran dan hotel yang tumbuh sebesar 5,54%, lebih tinggi dari pertumbuhan 2017 sebesar 5,40% (Grafik 2.4). Beberapa faktor lain yang memengaruhi perkembangan ini yakni perkembangan kelas menengah, peningkatan akses teknologi, dan transisi demografi masyarakat yang didominasi oleh generasi produktif usia muda.

Peningkatan kinerja konsumsi swasta juga bersumber dari konsumsi LNPRT yang tumbuh tinggi didorong oleh penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 171 daerah pada paruh pertama. Bersamaan dengan itu, aktivitas persiapan penyelenggaraan Pemilu 2019 sejak awal 2018 turut mendorong kinerja konsumsi LNPRT. Dengan perkembangan ini, konsumsi LNPRT yang memiliki pangsa sebesar 2,12% terhadap konsumsi swasta mampu tumbuh 9,08% pada 2018. Kinerja ini meningkat signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan 2017 yang tercatat 6,93%.

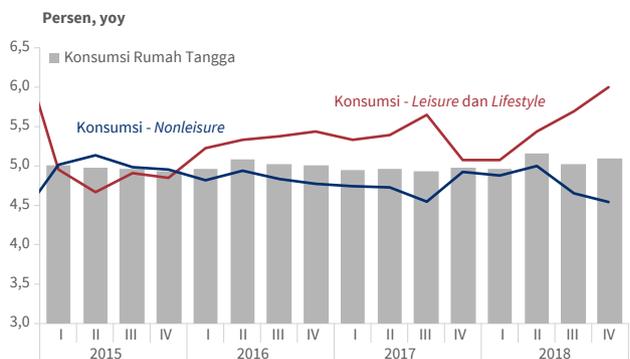
Peran konsumsi pemerintah juga berkontribusi pada peningkatan permintaan domestik. Konsumsi pemerintah 2018 mampu tumbuh sebesar 4,80%, jauh lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya sebesar 2,13%. Ekspansi konsumsi pemerintah dipengaruhi peningkatan basis jumlah dan penyesuaian tunjangan pegawai, serta belanja barang terkait penyelenggaraan kegiatan internasional dan Pilkada. Peningkatan konsumsi pemerintah juga selaras dengan kebijakan belanja pemerintah yang difokuskan pada menjaga

**Grafik 2.3. Indeks Keyakinan Konsumen**



Sumber: Bank Indonesia

**Grafik 2.4. Konsumsi Leisure dan Nonleisure**



Keterangan:  
*Leisure dan Lifestyle* : transportasi dan komunikasi + restoran dan hotel  
*Nonleisure* : makanan - minuman nonrestoran, pendidikan dan kesehatan, pakaian perumahan dan peralatan RT, lainnya

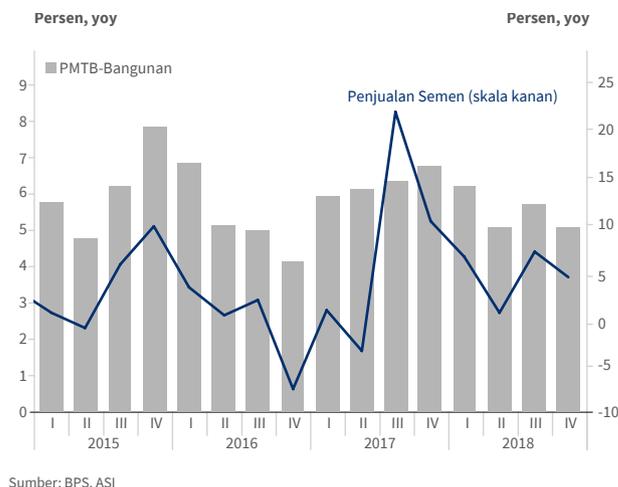
Sumber: BPS, diolah

daya beli masyarakat dengan mengedepankan stimulus jangka pendek berupa belanja bansos. Stimulus fiskal oleh Pemerintah Daerah (Pemda) yang tercermin dari penyerapan APBD yang tinggi turut menopang kinerja perekonomian.

PMTB juga menjadi sumber ekspansi perekonomian 2018 ditopang peningkatan signifikan investasi nonbangunan. Investasi nonbangunan 2018 tumbuh 10,31%, tertinggi sejak 2012, yang terutama bersumber dari kinerja investasi mesin dan perlengkapan yang tumbuh signifikan (Grafik 2.5). Perkembangan ini didorong oleh, antara lain, akselerasi pembangunan proyek infrastruktur listrik yang merupakan bagian dari proyek 35.000 MW dan jaringan telekomunikasi serat optik nasional. Investasi pada kendaraan juga tumbuh tinggi sejalan dengan kinerja sektor pertambangan yang meningkat. Sementara itu, kinerja investasi bangunan tetap tumbuh kuat 5,45% turut didukung oleh proyek pembangunan residensial oleh swasta sebagaimana tercermin pada konsumsi semen yang tumbuh tinggi (Grafik 2.6).

Kinerja investasi oleh korporasi yang meningkat tercermin pada pertumbuhan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Sepanjang 2018, PMDN meningkat 25,25% ditopang oleh peningkatan investasi pada sektor primer dan tersier (Grafik 2.7). Investasi PMDN pada sektor primer masih bersumber dari sektor pertambangan didorong level harga komoditas global yang masih baik dan perbaikan kinerja ekspor pertambangan. Investasi

**Grafik 2.6. Penjualan Semen dan Investasi Bangunan**

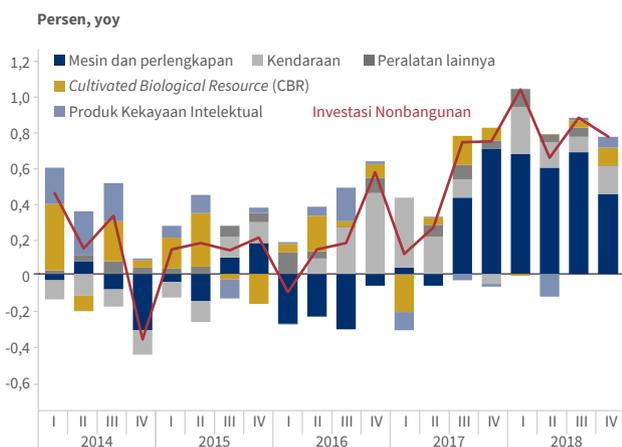


Sumber: BPS, ASI

terkait infrastruktur pendukung juga naik sejalan dengan perkembangan teknologi dan ekonomi digital. Selain itu, keberlanjutan pembangunan infrastruktur termasuk proyek kelistrikan juga mendorong kenaikan investasi PMDN pada sektor konstruksi, serta listrik, gas, dan air.

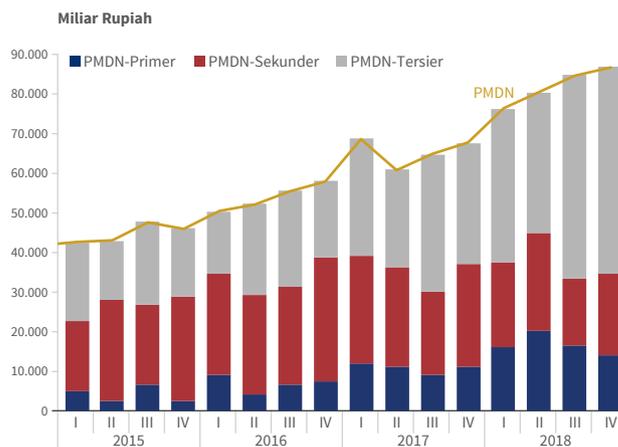
Peningkatan investasi swasta didukung menguatnya keyakinan pelaku usaha seiring stabilitas makroekonomi yang terjaga dan iklim usaha yang makin kondusif. Perbaikan iklim usaha tercermin pada peringkat utang Indonesia yang layak investasi serta survei kemudahan usaha dari Bank Dunia. Kenaikan peringkat utang menjadi layak investasi kembali terafirmasi pada 2018 oleh kelima lembaga pemeringkat.<sup>2</sup> Survei kemudahan

**Grafik 2.5. Kontribusi Pertumbuhan Investasi Nonbangunan terhadap PDB**



Sumber: BPS, diolah

**Grafik 2.7. Realisasi Investasi PMDN**



Sumber: BKPM

2 Lima lembaga pemeringkat terdiri atas Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR), Rating Investment Information, Inc. (R&I), Moody's Investor Service (Moody's), Standard & Poor's (S&P), dan Fitch Ratings.

usaha dari Bank Dunia pada tahun laporan menunjukkan perbaikan skor pada beberapa aspek seperti: (i) aspek memulai usaha melalui pengurangan biaya notaris; (ii) aspek pendaftaran properti terkait pengurangan waktu penyelesaian sengketa tanah di pengadilan; dan (iii) aspek memperoleh kredit sejalan dengan perbaikan akses informasi kredit. Secara keseluruhan kondisi ini membuat peringkat Ease of Doing Business (EoDB) 2019 Indonesia tetap baik yakni peringkat ke-73, sedikit turun dibandingkan dengan peringkat tahun sebelumnya di level ke-72. Peringkat tersebut lebih baik dibandingkan India (77) dan Filipina (124), namun masih lebih rendah bila dibandingkan Malaysia (15), Thailand (27), dan Vietnam (69).

Permintaan domestik yang tumbuh tinggi pada gilirannya mendorong peningkatan impor pada 2018. Impor pada 2018 bertumbuh 12,04%, lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja 2017 sebesar 8,06%. Peningkatan impor ini tidak terlepas dari peningkatan kebutuhan domestik untuk proyek infrastruktur yang diyakini dapat menopang produktivitas perekonomian pada masa mendatang.

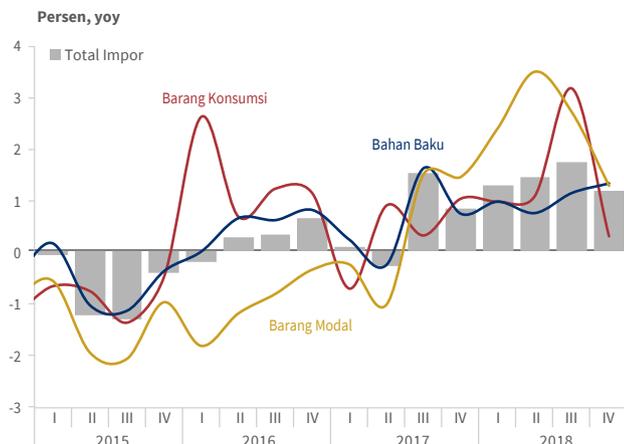
Peningkatan impor terutama dipengaruhi kenaikan impor barang di semua kategori yakni bahan baku, barang modal, dan barang konsumsi (Grafik 2.8). Impor bahan baku yang mencakup lebih dari 70% impor nonmigas meningkat didorong kebutuhan yang tinggi untuk mendukung aktivitas produksi seperti besi baja, bahan kimia organik, pakan ternak, dan emas. Peningkatan impor bahan baku juga didorong kebutuhan suku

cadang dan peralatan untuk barang modal terkait proyek kelistrikan dan telekomunikasi. Selanjutnya, kinerja investasi nonbangunan yang tumbuh tinggi juga mendorong peningkatan impor barang modal terutama impor nontransportasi terkait mesin dan perlengkapan baik di sektor industri maupun konstruksi. Begitu pula impor konsumsi yang meningkat sejalan dengan peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga.

Dalam perkembangan triwulanan, pertumbuhan impor mulai melambat pada triwulan IV 2018. Impor pada triwulan IV 2018 tumbuh 7,10%, melambat dari tiga triwulan sebelumnya yang rata-rata mencapai sekitar 14%. Penurunan ini tidak terlepas dari dampak positif bauran kebijakan yang ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia, termasuk program pemerintah untuk mengendalikan impor serta dampak pergerakan nilai tukar Rupiah.

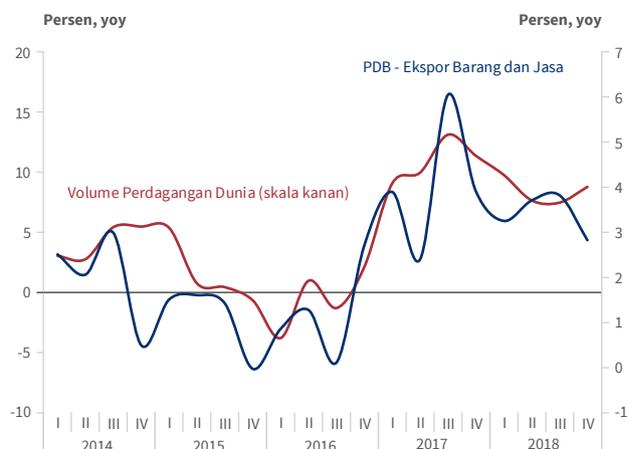
Di sisi lain, kinerja ekspor melambat akibat penurunan volume perdagangan dunia dan harga komoditas. Ekspor pada 2018 tumbuh 6,48%, lebih rendah dari kinerja 2017 yang tumbuh 8,91%. Pertumbuhan ekonomi global yang melambat serta berdampak pada perlambatan volume perdagangan dunia dan penurunan harga komoditas, pada gilirannya memberikan tekanan pada kinerja ekspor Indonesia (Grafik 2.9). Berdasarkan negara tujuan ekspor, perlambatan ekspor dipengaruhi oleh penurunan permintaan dari mitra dagang utama seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan, di tengah kinerja ekspor Indonesia ke Amerika Serikat (AS) yang menguat sejalan akselerasi ekonomi AS pada 2018.

**Grafik 2.8. Impor Nonmigas Riil**



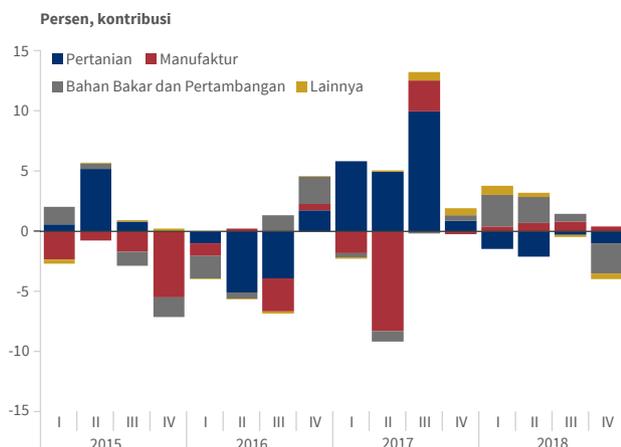
Sumber: Bank Indonesia

**Grafik 2.9. Ekspor Riil dan Volume Perdagangan Dunia**



Sumber: BPS, Bloomberg, diolah

**Grafik 2.10. Ekspor Nonmigas Riil**



Sumber: Bank Indonesia

Kinerja ekspor yang melambat terutama dipengaruhi oleh ekspor nonmigas, terutama *crude palm oil* (CPO) (Grafik 2.10). Kinerja ekspor CPO terkontraksi pada paruh pertama 2018, meskipun kemudian sedikit membaik pada paruh kedua 2018 akibat pergerakan harga internasional CPO dan kebijakan tarif bea masuk India. Sementara itu, kinerja ekspor manufaktur yang membaik menjadi penopang kinerja ekspor yang positif. Namun perbaikan tersebut ditopang oleh ekspor produk kimia dan besi dan baja yang memiliki konten impor tinggi, sehingga dampaknya ke ekspor neto menjadi terbatas.

Kinerja ekspor pertambangan membaik bersumber dari peningkatan ekspor batu bara dan bijih logam, di tengah kinerja ekspor produk olahan minyak dan gas yang masih terkontraksi. Peningkatan ekspor bijih logam ditopang dengan peningkatan produksi dan kuota ekspor konsentrat. Begitu juga peningkatan ekspor batu bara yang ditopang dengan peningkatan harga batu bara sampai dengan triwulan III 2018.

## 2.2. Sektor Sekunder dan Tersier Topang Pertumbuhan

Ekspansi perekonomian 2018 dari sisi Lapangan Usaha (LU) banyak ditopang sektor sekunder dan sektor tersier. Sejalan dengan permintaan domestik, pertumbuhan LU perdagangan besar dan eceran mencapai 4,97%, lebih tinggi dibandingkan dengan capaian 2017 sebesar 4,46% (Tabel 2.2). Permintaan domestik yang meningkat mendorong peningkatan intermediasi kegiatan perdagangan besar dan kemudian berkontribusi terhadap penciptaan nilai tambah di sektor perdagangan. Penyelenggaraan kegiatan berskala internasional yakni Asian Games dan Pertemuan Tahunan IMF dan WB turut mendukung peningkatan kinerja perdagangan domestik. Sejalan dengan perkembangan ini, indeks penjualan eceran membaik yakni tumbuh sebesar 3,74%, lebih tinggi

**Tabel 2.2. PDB Sisi Lapangan Usaha**

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018				
					I	II	III	IV	TOTAL
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,24	3,75	3,36	3,87	3,34	4,72	3,66	3,87	3,91
Pertambangan dan Pengalihan	0,43	-3,42	0,95	0,66	1,06	2,65	2,67	2,25	2,16
Industri Pengolahan	4,64	4,33	4,26	4,29	4,60	3,88	4,35	4,25	4,27
Pengadaan Listrik	5,90	0,90	5,39	1,54	3,31	7,56	5,58	5,46	5,47
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,24	7,07	3,60	4,60	3,65	3,94	6,20	7,92	5,46
Konstruksi	6,97	6,36	5,22	6,80	7,35	5,73	5,79	5,58	6,09
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Motor	5,18	2,54	4,03	4,46	4,99	5,22	5,28	4,39	4,97
Transportasi dan Pergudagangan	7,36	6,71	7,45	8,49	8,56	8,70	5,65	5,34	7,01
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,77	4,31	5,17	5,39	5,17	5,60	5,91	5,95	5,66
Informasi dan Komunikasi	10,12	9,70	8,88	9,63	7,76	5,11	8,14	7,17	7,04
Jasa Keuangan	4,68	8,58	8,90	5,47	4,23	3,06	3,14	6,27	4,17
Real Estate	5,00	4,11	4,69	3,66	3,19	3,07	3,82	4,24	3,58
Jasa Perusahaan	9,81	7,69	7,36	8,44	8,04	8,89	8,67	8,94	8,64
Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,38	4,63	3,19	2,06	5,79	7,20	7,93	7,13	7,02
Jasa Pendidikan	5,47	7,33	3,80	3,70	4,84	5,04	6,60	4,97	5,36
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Lainnya	7,96	6,69	5,15	6,84	6,06	7,07	7,54	7,80	7,13
Jasa Lainnya	8,93	8,08	8,02	8,73	8,43	9,22	9,19	9,08	8,99
Pajak Dikurangi Subsidi Atas Produk	5,08	32,55	19,20	13,33	9,13	13,90	8,40	10,83	10,58
<b>Produk Domestik Bruto</b>	<b>5,01</b>	<b>4,88</b>	<b>5,03</b>	<b>5,07</b>	<b>5,06</b>	<b>5,27</b>	<b>5,17</b>	<b>5,18</b>	<b>5,17</b>

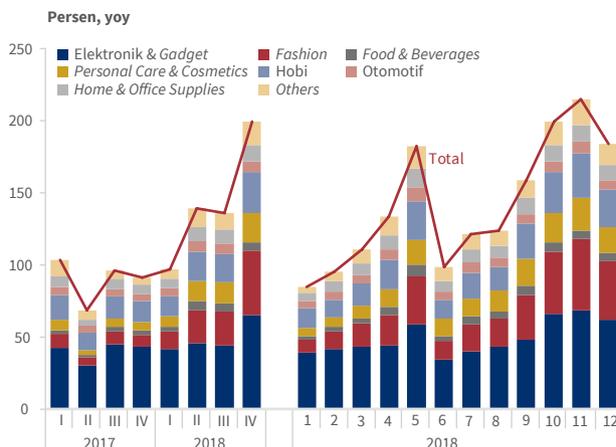
Sumber: BPS

dari pertumbuhan pada 2017 sebesar 2,89%. Selain itu, penjualan kendaraan bermotor juga meningkat sehingga mendorong perbaikan kinerja pada subsektor perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya (Grafik 2.11).

Perkembangan ekonomi digital turut berdampak positif kepada kinerja LU perdagangan besar dan eceran, LU informasi dan komunikasi, serta LU transportasi dan pergudangan. Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia sangat kuat tercermin dalam penjualan *online* dari 3 *marketplace* yang berada dalam tren meningkat dan mencatatkan pertumbuhan di atas 100% (Grafik 2.12). Pertumbuhan ekonomi digital tidak hanya mendorong aktivitas bisnis, tapi juga menyerap tenaga kerja informal. Bisnis *online* yang tumbuh pesat juga berpengaruh positif pada penggunaan data internet. Begitu pula pada LU transportasi dan pergudangan yang ikut mendapatkan pengaruh positif dari perkembangan bisnis *online* dari peningkatan belanja iklan, jasa transportasi pengiriman barang dan pengantaran penumpang, serta jasa logistik dan pergudangan.

Kinerja industri pengolahan dengan pangsa terbesar dalam PDB stabil didukung perbaikan kinerja pada sebagian subLU. Pertumbuhan sektor industri pengolahan tercatat 4,27% pada 2018, tidak banyak berubah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2017 sebesar 4,29%. Berdasarkan subLU, perbaikan kinerja terutama terlihat pada industri tekstil dan pakaian jadi, industri karet, barang dari karet dan plastik, serta industri pengolahan tembakau. Hal ini sejalan dengan perbaikan kinerja ekspor pakaian dan karet. Namun, beberapa subLU tumbuh moderat, seperti pada subLU

**Grafik 2.12. Penjualan Online**



Sumber: Bank Indonesia

industri makanan dan minuman (terutama industri CPO), serta subLU industri furnitur yang mengalami moderasi pertumbuhan. Dua subLU utama lainnya, yaitu industri kimia, farmasi, dan obat tradisional, serta subLU industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik bahkan mengalami pertumbuhan negatif. Perkembangan beberapa subLU ini perlu menjadi perhatian sehingga dapat terus meningkatkan peran sektor industri pengolahan (Lihat Boks 2.1 Mendorong Industri Manufaktur Berorientasi Ekspor).

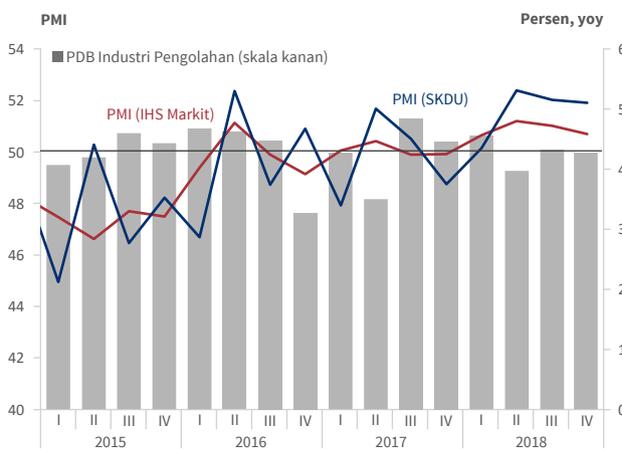
Kinerja industri manufaktur yang tumbuh stabil tergambar pada indikator *purchasing manager index* (PMI) dan indikator keuangan korporasi. Data menunjukkan PMI berada pada fase ekspansi sepanjang 2018 (Grafik 2.13). Sementara itu, kinerja keuangan korporasi pada 2018 membaik tercermin pada tingkat

**Grafik 2.11. Penjualan Mobil dan Motor**



Sumber: BPS, Gaikindo, AISI

**Grafik 2.13. Purchasing Manager Index dan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan**



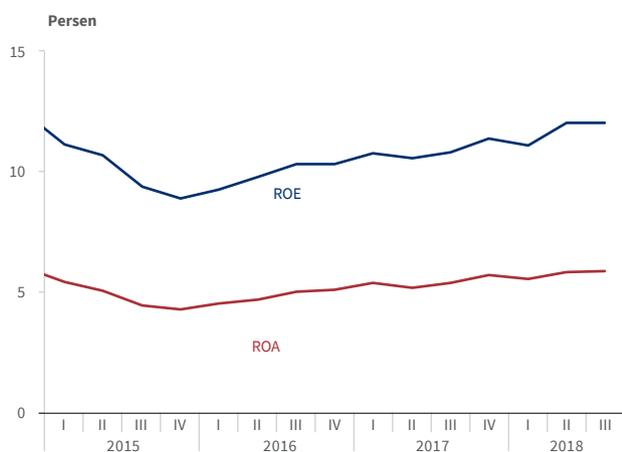
Sumber: BPS, IHS Markit, Bank Indonesia

profitabilitas dan tingkat produktivitas yang meningkat. Tingkat profitabilitas korporasi tercermin pada rasio *return on asset* (ROA) dan *return on equity* (ROE) yang mengalami peningkatan (Grafik 2.14). Peningkatan tersebut diikuti dengan tingkat produktivitas korporasi (*asset turnover* dan *inventory turnover*) yang membaik (Grafik 2.15). Secara sektoral, kenaikan profitabilitas korporasi ditunjukkan oleh sektor industri, sektor pertambangan, dan sektor perdagangan (Tabel 2.3).

Kinerja LU konstruksi juga tumbuh kuat ditopang percepatan penyelesaian pembangunan proyek infrastruktur, yang tengah memasuki tahap akhir. LU konstruksi tumbuh tinggi yakni sebesar 6,09%, meskipun sedikit menurun dibandingkan dengan realisasi 2017 sebesar 6,80%. Sepanjang 2018, tercatat 32 proyek strategis nasional (PSN) berhasil diselesaikan dengan estimasi nilai proyek mencapai 23,7 miliar dolar AS. Selain proyek yang telah diselesaikan tersebut, juga terdapat 32 proyek lainnya, yaitu 1 program kelistrikan (35.000 MW) dan program pemerataan ekonomi baik yang telah dioperasikan sebagian maupun dalam tahap penyelesaian. Berbagai akselerasi pembangunan proyek infrastruktur pada gilirannya juga berdampak pada kegiatan di sektor properti khususnya jenis properti hunian.

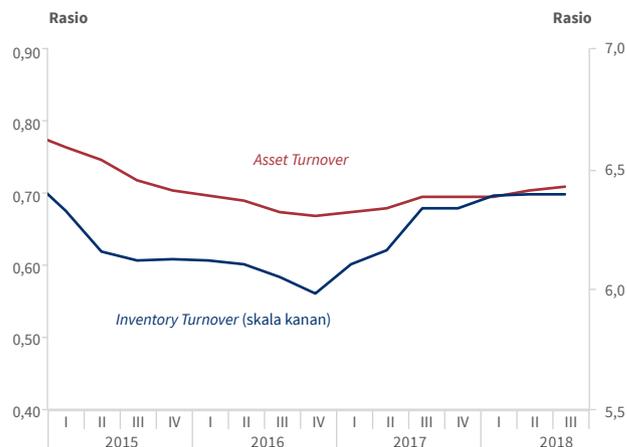
Perbaikan kinerja perekonomian domestik juga tercermin pada peningkatan sektor jasa yaitu LU administrasi pemerintahan dan LU jasa pendidikan dan jasa keuangan. Pada 2018, pertumbuhan LU administrasi pemerintahan tercatat 7,02%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya

**Grafik 2.14. Profitabilitas Korporasi Nonkeuangan**



Sumber: Laporan Keuangan Korporasi di Bursa Efek Indonesia, Bloomberg, diolah

**Grafik 2.15. Produktivitas Korporasi Nonkeuangan**



Sumber: Laporan Keuangan Korporasi di Bursa Efek Indonesia, Bloomberg, diolah

sebesar 2,06%. Kenaikan pertumbuhan LU tersebut seiring dengan aktivitas belanja pemerintah yang lebih akseleratif terutama pada triwulan II dan triwulan III 2018. LU jasa pendidikan juga tumbuh 5,36% pada 2018, meningkat dari tahun 2017 yang tumbuh sebesar 3,70% dipengaruhi, antara lain, peningkatan jumlah peserta didik, pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan tunjangan profesi guru, dan pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Peran sektor pariwisata yang meningkat tergambar pada kinerja positif LU akomodasi dan makanan minuman. Perkembangan ini antara lain dipengaruhi bergesernya

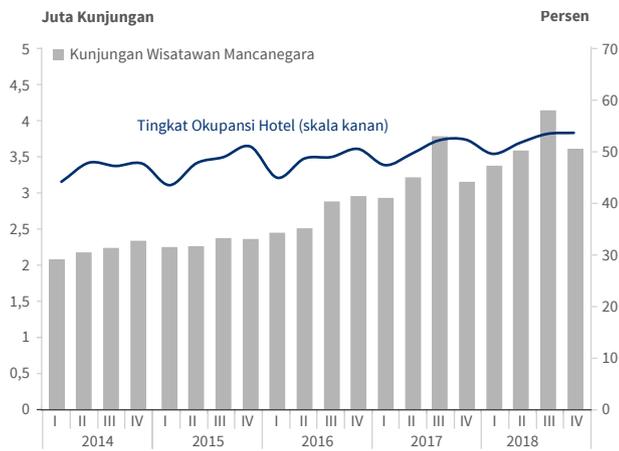
**Tabel 2.3. Kinerja Keuangan Korporasi Nonkeuangan**

Sektor	ROA (%)		ROE(%)		Asset Turnover		Inventory Turnover	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Pertanian	5,19	3,01	10,09	5,89	0,65	0,61	7,73	6,52
Industri Dasar & Kimia	3,29	5,36	6,45	10,87	0,69	0,68	5,36	5,54
Industri Barang Konsumsi	12,66	12,98	21,44	22,05	1,29	1,30	5,07	5,26
Infrastruktur, Utilitas & Transportasi	4,26	3,66	10,02	8,88	0,55	0,54	63,00	54,34
Aneka Industri	5,20	5,70	11,28	12,58	0,76	0,76	8,23	7,52
Pertambangan	5,74	8,81	10,73	16,71	0,54	0,73	16,37	18,26
Properti & Real Estate	4,59	4,21	9,55	9,25	0,34	0,33	1,99	2,12
Perdagangan, Jasa & Investasi	4,70	5,18	8,58	9,72	0,97	1,01	7,90	7,50
<b>Agregat</b>	<b>5,40</b>	<b>5,85</b>	<b>10,80</b>	<b>12,04</b>	<b>0,70</b>	<b>0,71</b>	<b>6,40</b>	<b>6,46</b>

Posisi data Tw III 2017 dan Tw III 2018 (332 korporasi)

Sumber: Laporan Keuangan Korporasi di Bursa Efek Indonesia, Bloomberg, diolah

**Grafik 2.16. Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Tingkat Okupansi Hotel**



Sumber: BPS

preferensi masyarakat kelas menengah atas ke arah *leisure* dan *lifestyle*. Pergeseran preferensi mendorong aktivitas wisata wisatawan domestik dan meningkatkan konsumsi produk restoran. Peningkatan preferensi untuk makan minum di restoran tercermin pada peningkatan kinerja subsektor penyediaan makan minum. Selain itu, penyelenggaraan perhelatan level internasional seperti Asian Games dan pertemuan tahunan IMF-WB pada paruh kedua 2018 turut berdampak positif pada peningkatan kinerja LU ini. Secara keseluruhan, perkembangan ini terlihat dari peningkatan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) dan tingkat okupansi hotel berbintang (Grafik 2.16).

Sektor primer juga berperan dalam menopang ekspansi perekonomian 2018. Pertumbuhan LU pertambangan

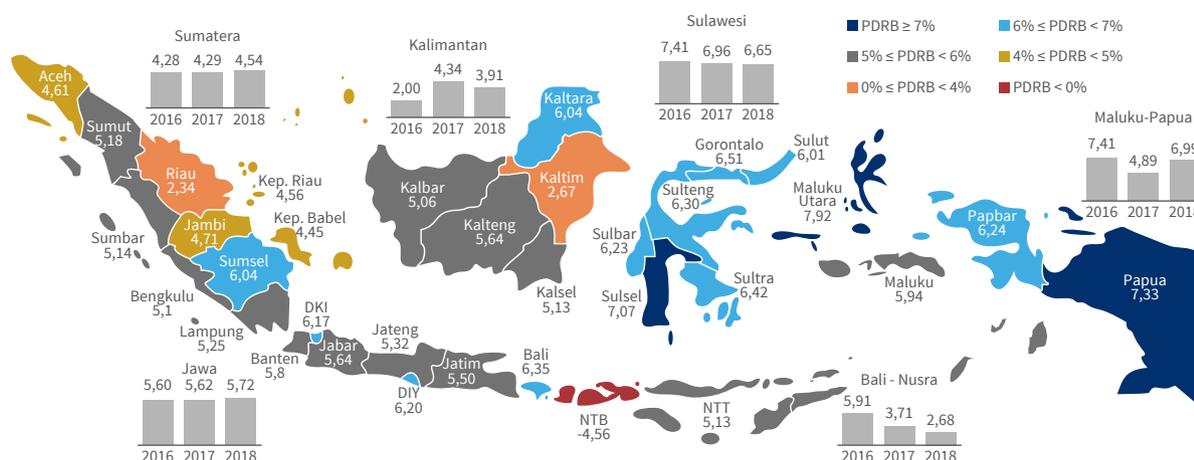
dan penggalian tercatat sebesar 2,16%, naik signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan 2017 sebesar 0,66%. Capaian tersebut terutama ditopang produksi pertambangan biji logam yang meningkat, sejalan dengan perbaikan harga komoditas logam pada paruh pertama 2018 dan peningkatan kuota ekspor konsentrat. Sementara itu, LU pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai penyumbang terbesar ketiga PDB dengan pangsa sebesar 12,54%, tumbuh 3,91% pada 2018, sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan tahun sebelumnya (3,87%).

### 2.3. Pertumbuhan di Banyak Daerah Meningkat

Perekonomian nasional yang tumbuh meningkat terutama ditopang kinerja perekonomian Jawa, Sumatera, dan Mapua yang tumbuh kuat. Perekonomian Jawa dan Sumatera pada 2018 kembali mencatatkan pertumbuhan yang meningkat, masing-masing mencapai 5,72% dan 4,54% (Gambar 2.1). Permintaan domestik menjadi mesin utama pertumbuhan di kedua wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi Jawa yang meningkat juga ditopang oleh kinerja ekspor manufaktur yang membaik seiring dengan meningkatnya kinerja LU industri pengolahan. Sementara itu, perekonomian Mapua tumbuh tinggi mencapai 6,99% pada 2018 didorong oleh kinerja ekspor tambang yang meningkat.

Pertumbuhan nasional tertahan oleh kinerja perekonomian yang menurun di Sulawesi, Bali-Nusra, dan Kalimantan. Pada 2018, perekonomian Sulawesi dan Bali-Nusra mencatatkan pertumbuhan masing-masing

**Gambar 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Tahun 2018**



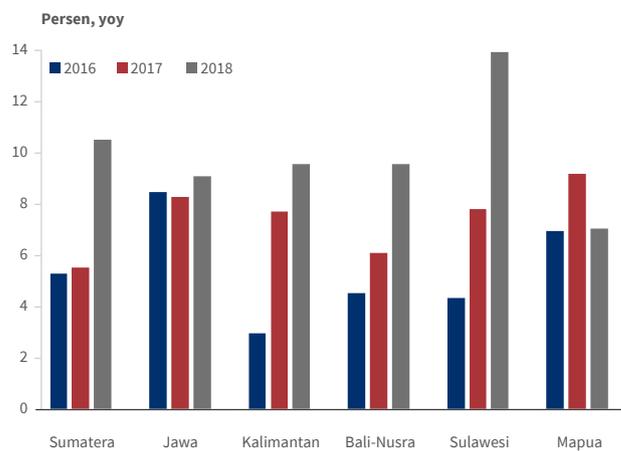
Sumber: BPS, diolah

sebesar 6,65% dan 2,68%, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan Sulawesi disebabkan oleh kinerja investasi yang melambat seiring dengan telah selesainya pembangunan berbagai proyek infrastruktur berskala besar. Sementara itu, perlambatan pertumbuhan Bali-Nusra terutama disebabkan oleh perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mengalami kontraksi hingga 4,56%. Kondisi tersebut disebabkan kinerja ekspor tambang yang menurun dan dampak bencana gempa bumi yang terjadi pada paruh kedua 2018. Penurunan kinerja ekspor tambang juga menyebabkan perekonomian Kalimantan tumbuh melambat pada 2018 menjadi 3,91%.

Perbaikan ekonomi di berbagai daerah dipengaruhi kuatnya kinerja konsumsi rumah tangga sejalan pengaruh perbaikan pendapatan, inflasi yang rendah, serta stimulus fiskal untuk kelompok pendapatan bawah (Grafik 2.17). Rangkaian penyelenggaraan Asian Games yang mencapai puncaknya pada triwulan III 2018 juga menjadi penambah daya dorong konsumsi RT di Jawa dan penopang konsumsi RT di Sumatera. Adapun konsumsi RT di Bali-Nusra ditopang oleh perkembangan positif ekonomi Bali seiring dengan penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia. Lebih lanjut, pelaksanaan Pilkada serentak di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota pada paruh pertama 2018 menjadi pendorong meningkatnya pertumbuhan konsumsi LNPRT di hampir seluruh wilayah (Grafik 2.18).

Konsumsi pemerintah turut memberikan stimulus bagi pertumbuhan daerah. Konsumsi pemerintah mengalami

**Grafik 2.18. Konsumsi LNPRT Berdasarkan Wilayah**

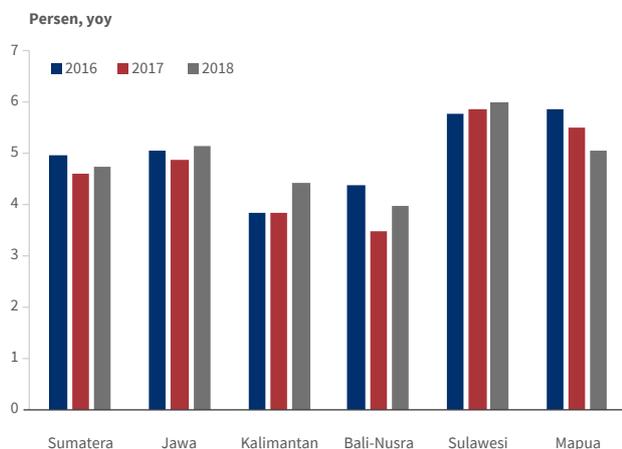


Sumber: BPS, diolah

pertumbuhan yang meningkat di sebagian besar wilayah, kecuali Bali-Nusra dan Mapua yang tumbuh melambat (Grafik 2.19). Peningkatan konsumsi pemerintah di berbagai daerah terutama didorong oleh pelaksanaan Pilkada serentak serta komitmen pemerintah memberikan stimulus jangka pendek untuk menjaga daya beli masyarakat. Hal ini sebagaimana tercermin pada realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) oleh Pemerintah yang optimal dan merata di seluruh wilayah. Selain itu, penyelenggaraan Asian Games dan Pertemuan Tahunan IMF dan WB juga menjadi penopang peningkatan belanja pemerintah daerah, khususnya di Sumatera dan Jawa.

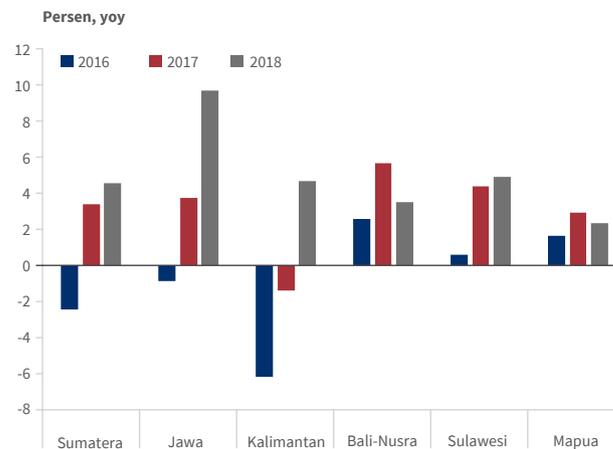
Investasi yang tumbuh meningkat di hampir seluruh wilayah menambah daya dorong terhadap perekonomian

**Grafik 2.17. Konsumsi RT Berdasarkan Wilayah**



Sumber: BPS, diolah

**Grafik 2.19. Konsumsi Pemerintah Berdasarkan Wilayah**



Sumber: BPS, diolah

daerah (Grafik 2.20). Peningkatan investasi terutama didorong oleh investasi nonbangunan yang terindikasi meningkat di seluruh wilayah. Peningkatan investasi nonbangunan di Sumatera ditopang antara lain oleh percepatan penyelesaian proyek terkait Asian Games di Provinsi Sumatera Selatan. Di wilayah timur Indonesia, peningkatan investasi nonbangunan didorong oleh investasi sektor pertambangan dan investasi pembelian alat konstruksi untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis pemerintah. Di Jawa, peningkatan investasi nonbangunan bersumber dari meningkatnya realisasi investasi mesin dan peralatan industri, antara lain untuk mendukung peningkatan produksi industri alat angkutan.

Pembangunan PSN khususnya infrastruktur konektivitas dan energi di daerah, turut menopang kinerja PMTB di hampir seluruh wilayah. Di Jawa, terdapat pembangunan proyek *light rail train* (LRT) di DKI Jakarta, Pelabuhan Patimban di Jawa Barat, dan Bandara *New Yogyakarta International Airport* di DI Yogyakarta yang masih dalam proses pengerjaan. Di Sumatera, terdapat pembangunan ruas jalan tol trans Sumatera yang berjalan sesuai target seiring akselerasi pembangunan infrastruktur penunjang Asian Games di Sumatera Selatan. Di wilayah timur Indonesia, pembangunan trans Sulawesi, trans Papua, dan infrastruktur pendukung tol laut masih berjalan sesuai rencana. Meskipun demikian, penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur menyebabkan investasi di Jawa dan Sulawesi tumbuh sedikit melambat. Proyek tersebut antara lain lima proyek jalan tol Jawa dengan panjang 331 km yang ditargetkan beroperasi pada 2018, *mass rapid transit* (MRT) Provinsi DKI Jakarta, bendungan

di Gorontalo dan infrastruktur energi terbarukan di Sulawesi Selatan.

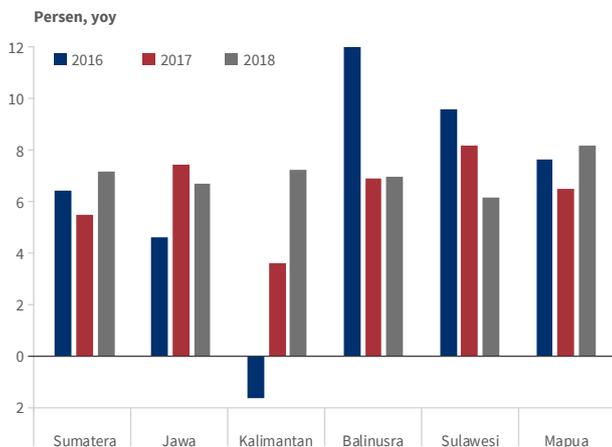
Permintaan domestik yang meningkat mendorong pertumbuhan impor luar negeri di seluruh wilayah. Peningkatan impor di semua wilayah didorong oleh impor barang konsumsi, terutama di Jawa. Peningkatan impor di Jawa juga didorong oleh kuatnya pertumbuhan impor bahan baku dan barang modal sejalan dengan pembangunan pabrik baru di sejumlah provinsi basis industri. Impor bahan baku dan barang modal di wilayah timur Indonesia juga naik seiring meningkatnya kebutuhan industri untuk ekspor. Sementara di Sumatera, pertumbuhan impor juga dipengaruhi oleh impor barang modal sejalan dengan percepatan pembangunan berbagai proyek infrastruktur seperti *venue* untuk Asian Games dan pembangunan jalan tol.

Kinerja ekspor nasional yang tumbuh melambat terutama tergambar pada kontraksi ekspor Kalimantan dan Bali-Nusra serta kinerja ekspor Sumatera yang melambat. Kontraksi ekspor Kalimantan dipengaruhi terutama oleh penurunan ekspor CPO seiring dengan tren penurunan harga global dan penurunan ekspor batu bara akibat pelemahan permintaan dari Tiongkok. Di Bali-Nusra, kontraksi disebabkan oleh menurunnya ekspor konsentrat tembaga di Provinsi NTB seiring dengan pengembangan blok tambang baru yang mengakibatkan tidak tercapainya target produksi. Sementara itu, penurunan harga global CPO juga memengaruhi kinerja ekspor Sumatera. Namun demikian, perlambatan ekspor Sumatera yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan ekspor batu bara dan produk kimia.

Perlambatan ekspor nasional yang lebih dalam dapat tertahan oleh kinerja ekspor Jawa, Sulawesi dan Mapua. Peningkatan ekspor Jawa ditopang oleh pertumbuhan ekspor tekstil dan produk tekstil, semen, serta mesin dan alat angkut. Ekspor alat angkut yang tetap tumbuh tinggi disebabkan oleh antara lain kembali dibukanya akses ekspor otomotif ke Vietnam, pengayaan varian ekspor mobil, serta peningkatan ekspor kereta api ke Bangladesh dan Filipina. Sementara itu, peningkatan ekspor Mapua didorong oleh adanya kenaikan ekspor konsentrat tembaga Provinsi Papua dan ekspor *liquefied natural gas* (LNG) Provinsi Papua Barat. Lebih lanjut, peningkatan ekspor Sulawesi didorong oleh dimulainya ekspor besi baja dari Provinsi Sulawesi Tengah.

Dari sisi lapangan usaha, kinerja LU perdagangan yang kuat menjadi penopang perekonomian di hampir

**Grafik 2.20. PMTB Berdasarkan Wilayah**



Sumber: BPS, diolah

seluruh wilayah sejalan dengan permintaan domestik dan aktivitas impor yang menguat. Penyelenggaraan berbagai kegiatan internasional seiring dengan perbaikan pendapatan masyarakat mendorong peningkatan kinerja LU perdagangan besar dan eceran di hampir seluruh wilayah, kecuali Bali-Nusra. Penyelenggaraan kegiatan internasional seperti Asian Games di Jakarta, Bandung dan Palembang mendorong peningkatan kinerja LU perdagangan besar dan eceran di Jawa dan Sumatera. Pertemuan Tahunan IMF dan WB juga turut mendorong kinerja LU perdagangan besar dan eceran di Provinsi Bali. Namun, bencana gempa menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas konsumsi masyarakat di NTB, sehingga berdampak terhadap menurunnya kinerja LU perdagangan besar dan eceran di Bali-Nusra.

Berlanjutnya berbagai proyek infrastruktur pemerintah berperan terhadap masih kuatnya kinerja LU konstruksi di seluruh wilayah. Di Sumatera, pertumbuhan LU konstruksi ditopang oleh penyelesaian ruas tol di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan, pelabuhan Kuala Tanjung, dan infrastruktur terkait Asian Games. Demikian pula halnya di Jawa, sejalan dengan penyelesaian pembangunan berbagai ruas jalan tol dan infrastruktur konektivitas lain. Di wilayah timur Indonesia, peningkatan kinerja LU konstruksi terutama terjadi di Sulawesi didorong oleh percepatan pembangunan PSN antara lain bendungan di Provinsi Gorontalo dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di Provinsi Sulawesi Selatan.

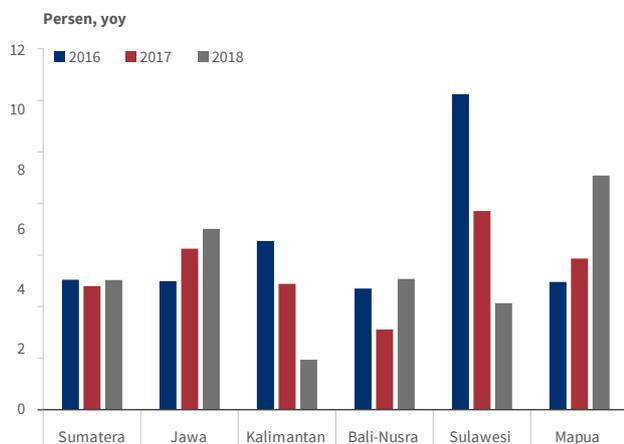
Kinerja LU industri pengolahan meningkat di Jawa, Sumatera dan sebagian wilayah timur Indonesia (Grafik 2.21). Peningkatan LU industri pengolahan

Jawa didukung oleh meningkatnya permintaan. Hal ini sebagaimana tercermin pada peningkatan kapasitas produksi industri seiring dengan pembangunan pabrik baru dan penambahan mesin produksi sejumlah industri seperti tekstil dan pakaian jadi, plastik dan otomotif. Kinerja LU industri pengolahan Sumatera juga meningkat didorong oleh implementasi kebijakan penggunaan biodiesel 20 (B20) oleh industri. Sementara itu, peningkatan kinerja LU industri pengolahan yang signifikan terjadi di Mapua didukung peningkatan kinerja industri pengilangan gas (LNG), makanan olahan (produk ikan) dan semen di Provinsi Papua Barat.

Kinerja LU pertambangan dan penggalian yang meningkat di Mapua dan Sumatera mendorong peningkatan pertumbuhan LU pertambangan dan penggalian nasional (Grafik 2.22). Akselerasi kinerja LU pertambangan dan penggalian di Mapua didorong oleh perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dan peningkatan kuota ekspor perusahaan tambang utama di Provinsi Papua. Peningkatan harga tembaga global turut mendorong kinerja LU ini khususnya pada paruh pertama 2018. Kinerja LU pertambangan dan penggalian Sumatera juga mengalami peningkatan terutama karena adanya dorongan permintaan batu bara domestik untuk kebutuhan PLTU. Berbeda dengan Sumatera, kinerja tambang batu bara Kalimantan mengalami penurunan karena permintaan batu bara dari negara mitra dagang yang menurun.

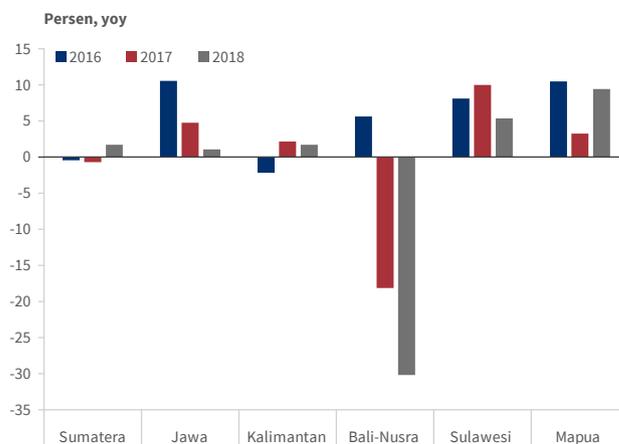
Kinerja subLU pertambangan minyak dan gas bumi nasional berkontraksi disebabkan terutama akibat menurunnya produksi minyak Sumatera dan Kalimantan

**Grafik 2.21. LU Industri Pengolahan Berdasarkan Wilayah**



Sumber: BPS, diolah

**Grafik 2.22. LU Pertambangan dan Penggalian Berdasarkan Wilayah**



Sumber: BPS, diolah

ditengah perbaikan produksi gas Mapua. Penurunan volume *lifting* minyak karena *natural declining* terjadi di Provinsi Riau dan Kalimantan Timur yang merupakan produsen minyak utama di Indonesia. Penurunan ini menyebabkan kinerja perekonomian secara keseluruhan di kedua provinsi ini kembali tumbuh terbatas, masing-masing sebesar 2,34% dan 2,67%. Di sisi lain, peningkatan harga gas sejak awal 2018 dan proses *maintenance* pada tahun sebelumnya mampu mendorong peningkatan *lifting* LNG Provinsi Papua Barat. Perbaikan produksi juga didorong oleh adanya peningkatan permintaan LNG dari Jepang dan Korea Selatan di tengah perlambatan permintaan dari Tiongkok. Perbaikan kinerja subLU ini dapat menopang kinerja ekonomi provinsi ini yang tumbuh mencapai 6,24%.

Kinerja LU pertanian, kehutanan dan perikanan melambat di hampir seluruh wilayah, kecuali Kalimantan. Di Jawa, kinerja tanaman pangan melambat dipengaruhi kekeringan yang melanda berbagai daerah khususnya di Provinsi Jawa Timur. Di Sumatera, kinerja tanaman perkebunan menurun akibat penurunan harga komoditas pertanian (CPO, karet dan kopi) dan tertahannya laju produksi kelapa sawit dan implementasi kebijakan Permen LHK No.7/2017 terkait perlindungan lahan gambut. Kinerja tanaman perkebunan juga melemah di Sulawesi disebabkan oleh terbatasnya produksi kakao seiring umur tanaman yang menua. Di Mapua, kinerja perikanan mengalami perlambatan karena adanya kebijakan moratorium kapal untuk penangkapan ikan dan kekurangan armada penangkapan ikan. Sementara itu, peningkatan kinerja LU pertanian di Kalimantan lebih dipengaruhi oleh kinerja tanaman perkebunan sejalan dengan perluasan lahan tanaman dan peningkatan produktivitas kelapa sawit.

## 2.4. Kualitas Pertumbuhan Membaik

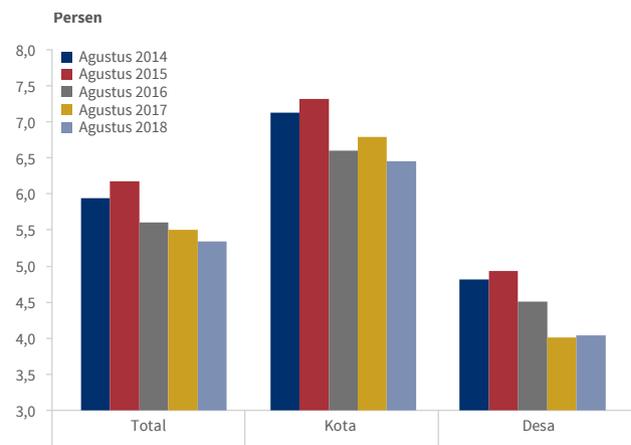
Pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada 2018 menopang perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ini tergambar pada tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan yang kembali menurun pada 2018. TPT tercatat 5,34% (yoy) pada Agustus 2018, lebih rendah dibandingkan dengan TPT pada Agustus 2017 yang sebesar 5,50% (yoy). Angka pengangguran tersebut juga tercatat paling rendah dalam satu dekade terakhir untuk periode survei ketenagakerjaan Agustus (Grafik 2.23).

Penurunan TPT terjadi di tengah kenaikan angkatan kerja sejalan dengan tumbuhnya populasi usia muda (bonus demografi). TPAK tercatat sebesar 67,26%, lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi periode yang sama pada 2017 (66,67%). Peningkatan TPAK antara lain disebabkan oleh angkatan kerja yang sebelumnya mengurus rumah tangga maupun sekolah kembali berpartisipasi dalam angkatan kerja.

Berdasarkan status pekerjaan, kontribusi penyerapan pekerja formal meningkat pada 2018. Serapan pekerja formal yang membaik bersumber dari peningkatan pekerja yang berusaha dibantu buruh tetap. Peningkatan dari sisi kontribusi tersebut paling tinggi dibandingkan dengan kategori pekerja formal lain (Grafik 2.24). Seiring dengan hal itu, jumlah pekerja tetap turut meningkat pada Agustus 2018. Adanya perbaikan pada serapan tenaga kerja formal juga tercermin pada indikator *job vacancy online* dan media cetak. Indeks *job vacancy* meningkat menjadi 137,8 pada Agustus 2018 dibandingkan dengan 134,1 pada Agustus 2017 (Grafik 2.25). Selanjutnya, pangsa status pekerja informal terus mengalami penurunan, meskipun masih dominan, yakni sebesar 56,84%.

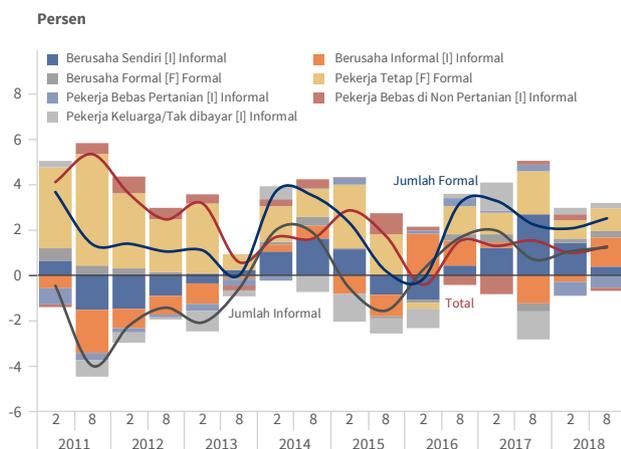
Berdasarkan sektor, perbaikan serapan tenaga kerja terutama terjadi pada sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR), transportasi dan komunikasi (transkom) serta masih kuatnya serapan industri pengolahan. Serapan tenaga kerja di sektor PHR pada Agustus 2018 tumbuh 9,09% (yoy) dan masih menjadi kontributor utama dalam

Grafik 2.23. Tingkat Pengangguran Terbuka



Sumber: BPS, diolah

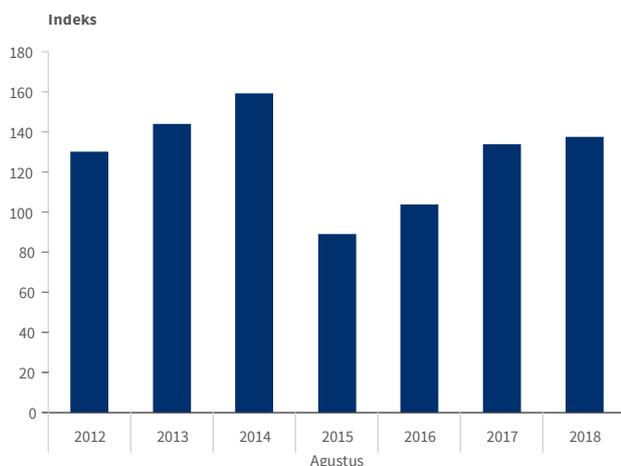
**Grafik 2.24. Kontribusi Pertumbuhan Pekerja Berdasarkan Status**



Sumber: BPS, diolah

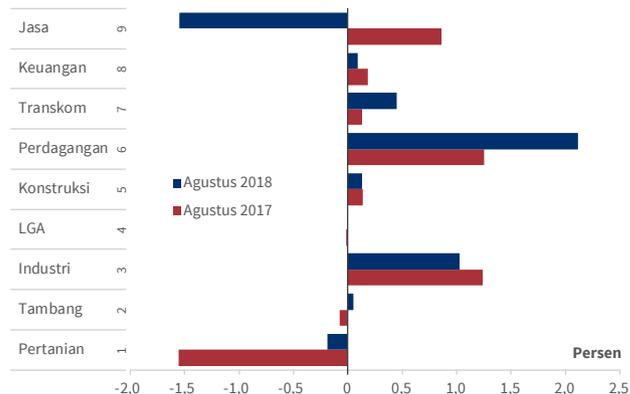
pertumbuhan tenaga kerja (Grafik 2.26). Hal ini sejalan dengan peningkatan kinerja LU perdagangan. Sektor transkom juga tumbuh tinggi pada Agustus 2018 yakni sebesar 9,38% dan menjadi salah satu kontributor utama setelah sektor PHR dan industri pengolahan. Lebih lanjut, serapan tenaga kerja manufaktur masih cukup kuat sejalan dengan perbaikan kinerja LU industri pengolahan. Hal ini tercermin dari jumlah tenaga kerja di LU industri pengolahan yang tumbuh 7,29% (yoy) pada Agustus 2018. Dengan demikian, secara agregat, pangsa tenaga kerja masih didominasi oleh sektor *nontradable* dengan fenomena divergensi antara sektor *nontradable* dan *tradable* yang terindikasi masih terus berlanjut.

**Grafik 2.25. Indikator *Job Vacancy Online***



Sumber: Bank Indonesia

**Grafik 2.26. Kontribusi Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Ekonomi**



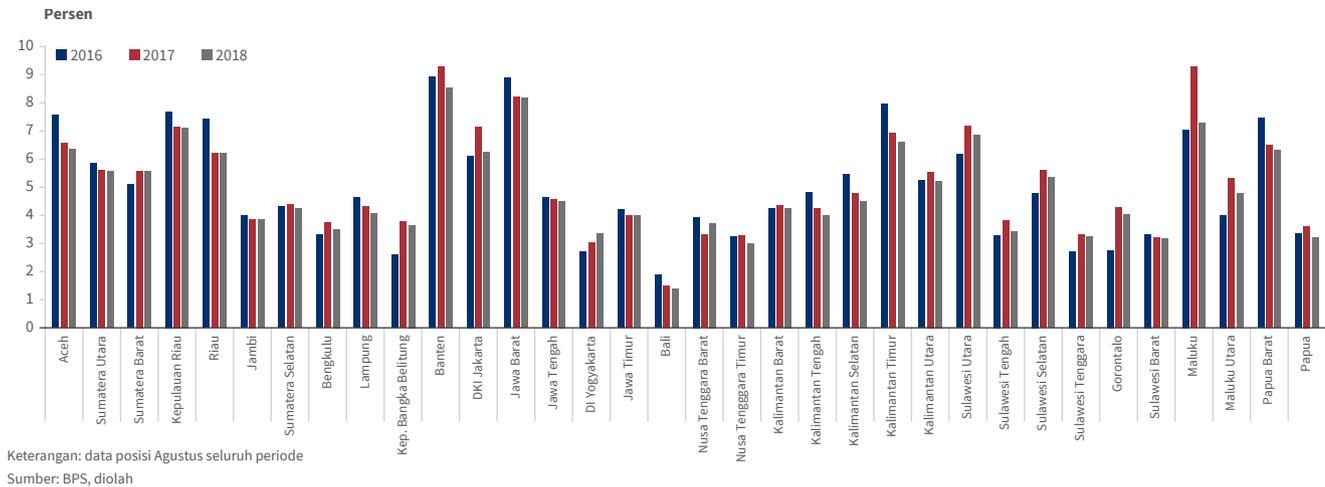
Sumber: BPS, diolah

Perkembangan ketenagakerjaan yang positif terjadi merata di berbagai daerah. Penurunan TPT pada Agustus 2018 tercatat terjadi di 32 provinsi, jauh lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya yang hanya terjadi di 16 provinsi (Grafik 2.27). Seluruh provinsi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Mapua mencatat penurunan TPT, dengan penurunan terdalam terjadi di Provinsi Maluku yakni dari 9,29% (yoy) pada Agustus 2017 menjadi 7,27% (yoy) pada Agustus 2018. Penurunan yang cukup dalam juga terjadi di Provinsi DKI Jakarta dan Banten yang merupakan basis utama sektor industri, masing-masing dari 7,15% (yoy) menjadi 6,24% (yoy). Lebih lanjut, penurunan TPT juga terjadi di hampir seluruh daerah di Jawa, kecuali Provinsi DI Yogyakarta. Kondisi ketenagakerjaan yang lebih baik terjadi seiring meningkatnya aktivitas industri dan sektor tersier di berbagai daerah untuk merespons permintaan domestik yang kuat. Di sisi lain, Provinsi NTB mengalami peningkatan TPT, yakni dari 3,32% (yoy) menjadi 3,72% (yoy), sejalan dengan kinerja perekonomian provinsi ini yang mengalami kontraksi pertumbuhan.

Indikator kesejahteraan lain yakni tingkat kemiskinan juga menurun signifikan pada 2018. Tingkat kemiskinan tercatat sebesar 9,82% pada Maret 2018 dan 9,66% pada September 2018, yang merupakan tingkat terendah sejak krisis ekonomi 1998 (Grafik 2.28).<sup>3</sup> Tren penurunan yang terjadi sejak 2015 ini secara fundamental dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang meningkat disertai dengan

3 Dengan total penduduk miskin sebesar 25,67 juta, tingkat kemiskinan tercatat 9,66% pada September 2018, menurun 910 ribu jiwa dibandingkan September 2017.

**Grafik 2.27. Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Provinsi**



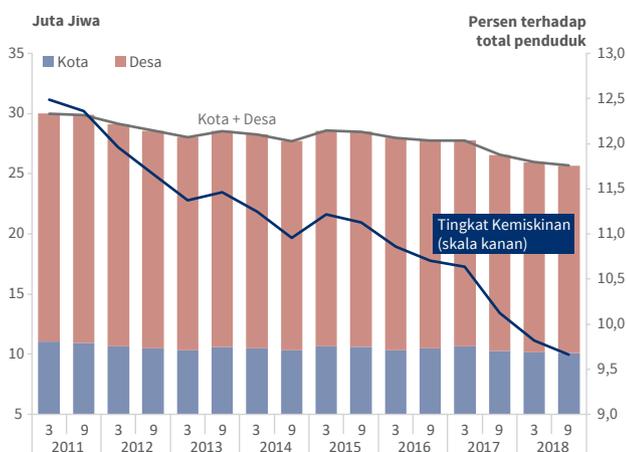
tingkat pengangguran yang menurun dan inflasi yang terkendali. Penurunan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan juga didukung oleh perluasan dan penyaluran program perlindungan sosial yang dilakukan Pemerintah. Penurunan kemiskinan terjadi baik di desa maupun kota dengan jumlah penurunan terbesar terjadi di perdesaan. Kondisi tersebut sejalan dengan perbaikan upah riil buruh tani dan NTP pada September 2018 dibandingkan dengan kondisi periode yang sama pada 2017. Selain itu, perbaikan kesejahteraan di perdesaan juga didukung oleh program dana desa yang didesain untuk membiayai pembangunan bersifat padat karya.

Penurunan tingkat kemiskinan terjadi di hampir seluruh provinsi. Penurunan angka persentase penduduk miskin

pada 2018 terjadi di 32 provinsi, lebih baik dibandingkan 2017 yang hanya terjadi di 25 provinsi (Grafik 2.29). Lebih lanjut, lima provinsi dengan persentase penduduk miskin terbesar pada 2017 yakni Provinsi Papua, Papua Barat, NTT, Maluku dan Gorontalo, mengalami perbaikan. Selain itu, seluruh provinsi di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Balinusra mencatatkan penurunan persentase penduduk miskin. Perkembangan positif ini tidak terlepas dari komitmen pemerintah untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah yang lebih merata melalui perbaikan akses konektivitas dan perluasan skema bansos.

Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan juga menurun pada 2018. Indeks kedalaman kemiskinan yang tercatat sebesar 1,71 pada Maret 2018 dan 1,63 pada September 2018 merupakan level terendah dalam lima tahun terakhir. Indeks tersebut membaik bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 1,83 (Maret 2017) dan 1,79 (September 2017). Demikian halnya dengan tingkat keparahan kemiskinan yang menunjukkan penurunan dari 0,46 pada September 2017 menjadi 0,41 pada September 2018.<sup>4</sup> Perbaikan kondisi ini juga dipengaruhi oleh penurunan kontribusi pengeluaran oleh kelompok masyarakat 20% teratas dan peningkatan kontribusi pengeluaran oleh kelompok masyarakat 40% terbawah dan 40% menengah. Peningkatan pengeluaran per kapita kelompok masyarakat 40% menengah sejalan dengan

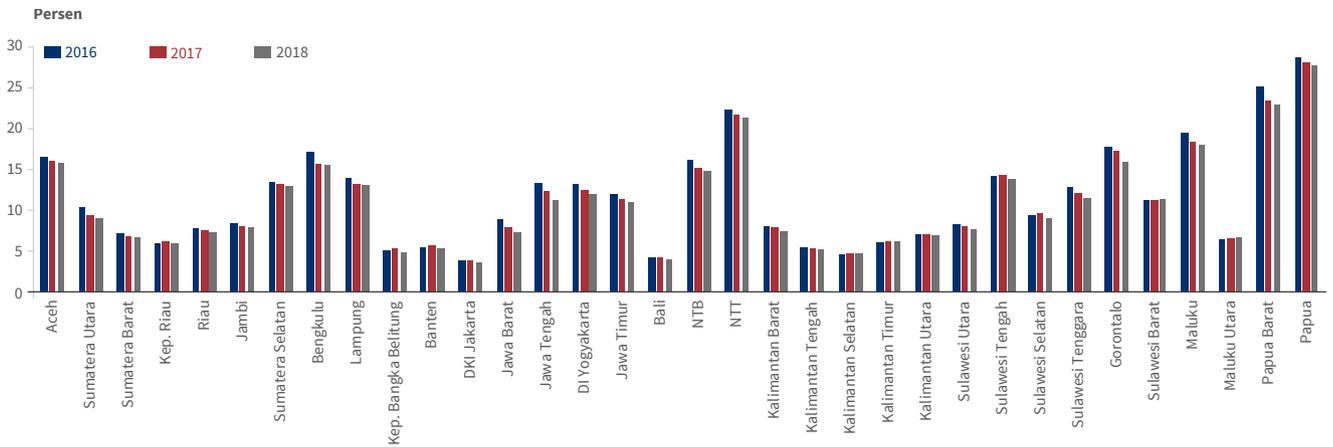
**Grafik 2.28. Tingkat Kemiskinan**



Sumber: BPS

<sup>4</sup> Indeks keparahan kemiskinan merupakan ukuran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Sementara indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

**Grafik 2.29. Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Provinsi**



Sumber: BPS, diolah

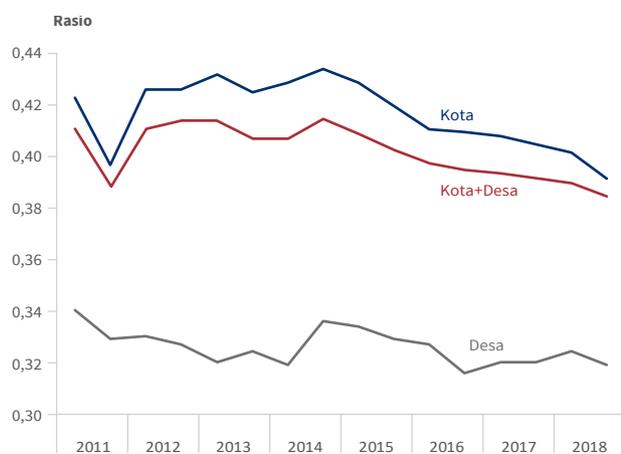
tren perbaikan kesejahteraan kelas menengah yang jumlahnya terus meningkat.

Penurunan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan terjadi di berbagai daerah, terutama di wilayah timur Indonesia. Pada September 2018, penurunan indeks kedalaman kemiskinan terjadi di 25 provinsi, sementara penurunan indeks keparahan kemiskinan terjadi di 23 provinsi. Kondisi ini lebih baik dibandingkan dengan level September 2017 ketika penurunan indeks kedalaman kemiskinan hanya terjadi di 15 provinsi dan penurunan indeks keparahan kemiskinan hanya terjadi di 13 provinsi. Penurunan indeks kedalaman kemiskinan yang signifikan terjadi di daerah-daerah yang memiliki tingkat

kedalaman kemiskinan di atas nasional. Berbagai daerah ini terutama terletak di wilayah timur Indonesia seperti Provinsi Papua, Gorontalo dan Papua Barat.

Kondisi kesenjangan pendapatan juga menurun. Perkembangan ini tergambar pada rasio gini tercatat 0,389 pada Maret 2018 dan 0,384 pada September 2018, lebih rendah dari kondisi Maret 2017 sebesar 0,393 maupun September 2017 sebesar 0,391 (Grafik 2.30). Hal ini juga menunjukkan penurunan kesenjangan baik di pedesaan maupun perkotaan. Meskipun demikian, tingkat kesenjangan yang lebih rendah terutama terjadi di perkotaan yang secara konsisten menunjukkan tren penurunan sejak Maret 2015. Penurunan kondisi ketimpangan juga tercermin dari distribusi pengeluaran per kapita untuk kelompok masyarakat 40% terbawah yang tumbuh paling tinggi dibandingkan dengan kelompok 40% menengah dan kelompok 20% teratas. Hal ini sejalan dengan perbaikan pendapatan masyarakat kelompok bawah, yang turut ditopang oleh program bansos.

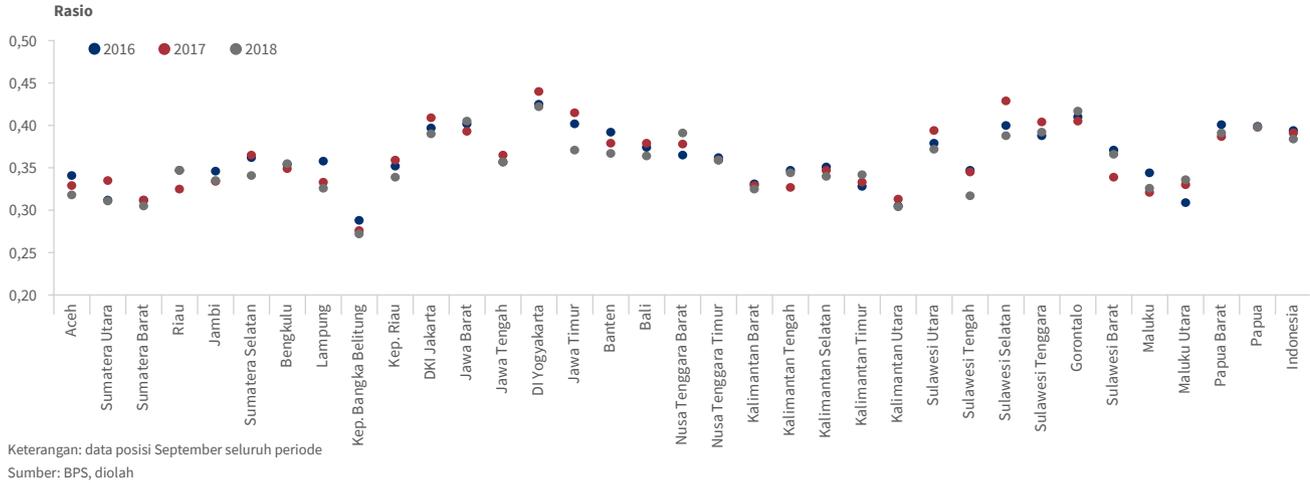
**Grafik 2.30. Rasio Gini**



Sumber: BPS, diolah

Penurunan tingkat kesenjangan dikonfirmasi oleh penurunan rasio gini di berbagai daerah yang merupakan basis perkotaan. Penurunan rasio gini pada September 2018 tercatat terjadi di 20 provinsi, sedikit lebih baik dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang mencatat penurunan di 18 provinsi. Penurunan rasio gini terdalam terutama terjadi di Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan yang memiliki daerah perkotaan yang signifikan (Grafik 2.31). Lebih lanjut, hampir seluruh provinsi di Jawa mencatat penurunan

**Grafik 2.31. Rasio Gini Berdasarkan Provinsi**



rasio gini, dengan tingkat penurunan bervariasi antara 0,008 hingga 0,044 basis poin, kecuali di Jawa Barat yang sedikit meningkat. Di Mapua, hampir seluruh provinsi

mencatat kenaikan rasio gini, meskipun tidak signifikan dengan tingkat kenaikan antara 0,004 hingga 0,006 basis poin.

### Boks 2.1.

## Mendorong Industri Manufaktur Berorientasi Ekspor

Industri manufaktur memiliki peran yang penting sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi Indonesia. Peran industri manufaktur ini tercermin dari rasio terhadap PDB yang cukup besar, komposisi terhadap ekspor nasional dan penyerapan tenaga kerja, serta berperan dalam pembentukan daya saing nasional.<sup>1</sup> Di samping itu, peran industri manufaktur menjadi sangat penting untuk memperkuat struktur neraca perdagangan Indonesia yang saat ini masih didominasi oleh komoditas berbasis sumber daya alam. Dalam kaitan ini, pengembangan industri manufaktur perlu lebih diarahkan pada industri manufaktur berorientasi ekspor guna menunjang perbaikan kinerja neraca transaksi berjalan.

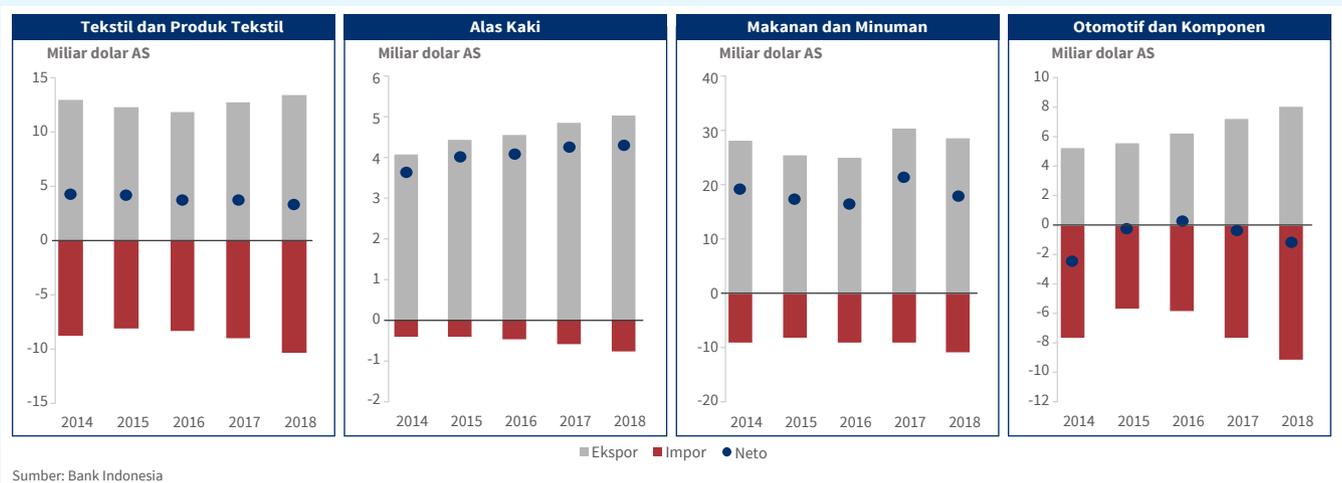
Berdasarkan identifikasi, potensi untuk mendorong peningkatan ekspor manufaktur terutama pada industri tekstil dan produk tekstil, alas kaki, makanan dan minuman (mamin), serta otomotif (Grafik 1).<sup>2</sup> Keempat industri ini juga menjadi target prioritas Pemerintah dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Meski demikian, upaya untuk

mengakselerasi pengembangan keempat industri tersebut perlu disertai upaya untuk mengatasi beberapa tantangan. Analisa lebih lanjut dengan metode *trade competitiveness diagnostic* (TCD) menunjukkan keempat industri tersebut menghadapi tantangan terkait faktor produksi, kelembagaan, dan akses pasar.<sup>3</sup>

Pada industri tekstil dan produk tekstil, tantangan terbesar berkaitan dengan faktor produksi yakni ketergantungan terhadap impor bahan baku yang tinggi, faktor ketersediaan dan kualitas tenaga kerja yang terbatas, dan investasi yang masih terbatas. Sementara itu, tantangan terbesar yang dihadapi industri alas kaki terkait dengan akses pasar yang masih terbatas. Tantangan pada industri mamin berkaitan dengan produktivitas yang rendah sejalan dengan keterbatasan penerapan teknologi dan ketergantungan impor bahan baku. Berbeda dengan ketiga industri tersebut, industri otomotif menghadapi tantangan terkait dengan skema insentif produksi domestik yang belum sejalan dengan permintaan global.

Secara umum, upaya untuk mendorong peningkatan peran industri manufaktur memerlukan strategi kebijakan yang terfokus. Dalam konteks ini, strategi perlu difokuskan pada tiga hal yang saling berkaitan dan perlu ditempuh secara terintegrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah (Gambar 1). Pertama,

Grafik 1. Sektor Prioritas Industri Manufaktur Berorientasi Ekspor



1 Pada 2018, industri manufaktur memiliki pangsa sebesar 21,0% dari PDB, pangsa ekspor manufaktur sebesar 48,0%, dan penyerapan tenaga kerja sebesar 14,7% (Agustus 2018).

2 Hasil kajian *Growth Strategy* (Bank Indonesia, 2018)

3 TCD merupakan alat analisa untuk melihat hambatan pada ekspor (Reis dan Farole, 2012)

mendorong perbaikan faktor produksi untuk mengatasi kesenjangan produktivitas. Hal ini berhubungan erat dengan upaya untuk mendorong peningkatan kapasitas industri domestik untuk dapat setara dengan negara kawasan. Strategi yang pertama ini mencakup penyediaan dukungan infrastruktur yang memadai bagi berkembangnya industri, serta ketersediaan sumber daya manusia yang sejalan dengan kebutuhan industri. Selain itu, strategi ini juga diarahkan untuk dapat mendorong berkembangnya industri hulu dan antara guna memperkuat keterkaitan antar industri domestik, sehingga mendorong peningkatan *local value chain*.

Strategi kedua berkaitan dengan pengaturan dan kelembagaan untuk mengatasi *regulatory deficiency*, termasuk insentif untuk ekspor. Implementasi dari strategi ini bertujuan untuk dapat meningkatkan iklim usaha melalui deregulasi dan penerapan skema insentif untuk menarik investasi. Implementasi dari strategi ini juga mencakup penyediaan skema insentif untuk industri meningkatkan orientasi ekspor. Penerapan strategi ini juga diarahkan untuk memastikan dukungan kelembagaan dan regulasi untuk menata pengembangan industri secara bertahap dapat berdaya saing di pasar global.

Strategi ketiga menekankan pada penguatan kerja sama perdagangan dan promosi untuk perluasan akses pasar. Dalam implementasinya, strategi ini ditempuh antara lain melalui perluasan perjanjian kerja sama

perdagangan (*free trade agreement*) dan kerja sama bilateral. Penerapan strategi ini disertai upaya untuk meningkatkan diversifikasi produk ekspor. Selain itu, peningkatan analisis pasar, khususnya dalam konteks *market intelligence* untuk meningkatkan kemampuan dalam memahami karakteristik tren permintaan global.

Peningkatan daya saing industri manufaktur juga ditempuh dengan mengoptimalkan peluang dari era industri 4.0 yang ditandai dengan meningkatnya konektivitas, serta interaksi terutama melalui teknologi informasi dan komunikasi. Era industri 4.0 ditunjang oleh berkembangnya lima elemen teknologi yakni *Internet of Things*, *Artificial Intelligence*, *Human-Machine Interface*, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi 3D *Printing*. Optimalisasi dari peluang ini diyakini akan dapat mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing perekonomian Indonesia. Dalam kaitan ini, Pemerintah meluncurkan *roadmap* atau peta jalan “Making Indonesia 4.0” pada 4 April 2018 yang menargetkan peningkatan peran industri dalam mendorong perekonomian Indonesia mencapai 10 besar ekonomi terkuat dunia tahun 2030. Pemerintah secara bertahap akan melakukan revitalisasi industri manufaktur untuk mendorong peningkatan peran ekspor yang kuat melalui perubahan teknologi dan inovasi yang dapat mendorong perbaikan produktivitas dan daya saing. Kontribusi ekspor yang kuat akan memperkuat ekonomi dan menjadikan pasar tenaga kerja menjadi lebih baik.

**Gambar 1.** Strategi Pengembangan Industri

